



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP - PHB 207 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan perlu melakukan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 071/BI/3/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Non Tanah dan/atau Bangunan pada UAKPB Biro Perencanaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan berjumlah 49 (empat puluh sembilan) unit sebagai Barang Milik Negara pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA total nilai perolehan secara keseluruhan sebesar Rp378.114.998,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang, dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Setjen Kemenhub;
8. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, DJKN Kementerian Keuangan;
9. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta;
10. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KP -PHB 207 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
 PADA BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
 PADA BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL

NO	KODE BMN	NUP	URAIAN BMN	MERK/TIPE	TANGGAL PEROLEHAN	KUANTITAS (Unit)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3050101004	2	Mesin Ketik Listrik	-	2023	1	2.000.000	Baik
2	3050104001	1	Lemari Besi/Metal	-	2023	1	5.270.000	Baik
3	3050104001	2	Lemari Besi/Metal	-	2023	1	5.270.000	Baik
4	3050104001	3	Lemari Besi/Metal	-	2023	1	5.270.000	Baik
5	3050201008	9	Meja Rapat	-	2023	1	2.958.333	Baik
6	3050201008	10	Meja Rapat	-	2023	1	2.958.333	Baik
7	3050201008	11	Meja Rapat	-	2023	1	2.958.333	Baik
8	3050201008	12	Meja Rapat	-	2023	1	2.958.333	Baik
9	3050201008	13	Meja Rapat	-	2023	1	2.958.333	Baik
10	3050201008	14	Meja Rapat	-	2023	1	2.958.333	Baik
11	3050201008	15	Meja Rapat	-	2023	1	1.284.000	Baik
12	3050201008	16	Meja Rapat	-	2023	1	1.284.000	Baik
13	3050201008	17	Meja Rapat	-	2023	1	1.284.000	Baik
14	3050201008	18	Meja Rapat	-	2023	1	1.284.000	Baik
15	3050201014	7	Meja Resepsionis	-	2023	1	32.745.000	Baik
16	3050201020	117	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.998.000	Baik
17	3050201020	118	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	5.217.000	Baik
18	3050201020	119	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	5.217.000	Baik
19	3050201020	120	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.600.000	Baik
20	3050201020	121	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.600.000	Baik
21	3050201020	122	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.600.000	Baik
22	3050201020	123	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.600.000	Baik
23	3050201020	124	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.600.000	Baik
24	3050201020	125	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.600.000	Baik
25	3050201020	126	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.600.000	Baik
26	3050201020	127	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.600.000	Baik
27	3050201020	128	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.600.000	Baik

NO	KODE BMN	NUP	URAIAN BMN	MERK/TIPE	TANGGAL PEROLEHAN	KUANTITAS (Unit)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	3050201020	129	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2023	1	1.600.000	Baik
29	3050201033	1	Sofa	-	2023	1	4.440.000	Baik
30	3050206002	6	Televisi	-	2023	1	36.000.000	Baik
31	3060101036	2	Microphone/Wireless MIC	-	2023	1	29.114.000	Baik
32	3100102001	75	P.C Unit	-	2023	1	21.000.000	Baik
33	3100102003	110	Note Book	-	2023	1	14.400.000	Baik
34	3100102003	111	Note Book	-	2023	1	14.400.000	Baik
35	3100102003	112	Note Book	-	2023	1	14.400.000	Baik
36	3100102003	113	Note Book	-	2023	1	14.400.000	Baik
37	3100102003	114	Note Book	-	2023	1	14.400.000	Baik
38	3100102003	115	Note Book	-	2023	1	14.400.000	Baik
39	3100102003	116	Note Book	-	2023	1	14.400.000	Baik
40	3100102003	117	Note Book	-	2023	1	14.400.000	Baik
41	3100102003	118	Note Book	-	2023	1	14.400.000	Baik
42	3100203004	21	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2023	1	8.848.000	Baik
43	3100203004	22	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2023	1	8.848.000	Baik
44	3100203004	23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2023	1	8.848.000	Baik
45	3100203004	24	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2023	1	8.848.000	Baik
46	3100203004	25	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2023	1	8.848.000	Baik
47	3100203004	26	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2023	1	8.848.000	Baik
48	6010303001	1	Lukisan Kanvas	-	2023	1	1.500.000	Baik
49	6010303001	2	Lukisan Kanvas	-	2023	1	1.500.000	Baik
JUMLAH						49	378.114.998	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



a.n MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.